

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN (KARYA DESAIN)
EKSPRESI MAKNA PELAYANAN PADA PERANCANGAN BANGUNAN
KANTOR PEMERINTAH**

Kasus studi: Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Oleh :

Ketua :

Ir. Riandy Tarigan, MT (NIDN. 0629056402)

Anggota :

Bonifasius Bayu Senasaputro, ST., MT (NPP.058.1.2018.323)

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
2020

FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (ext. 1461,1462), Fax. (024) 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



SURAT TUGAS

Nomer : 180/H.2/FAD/III/2020

Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, memberikan tugas kepada :

- Nama : Ir. Riandy Tarigan, MT NPP: 058.1.1.1991.097 (Ketua)
Bonifasius Bayu S, ST., MT NPP.058.1.2018.323
- Status : Dosen Fakultas Arsitektur dan Desain Unika Soegijapranata - Semarang
- Tugas : Sebagai Team Peneliti dengan Judul: EKSPRESI MAKNA PELAYANAN
PADA PERANCANGAN BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH Kasus studi:
Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sleman
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Penyelenggara : Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Waktu : 2 Maret sd 30 Juli 2020
- Keterangan : Harap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta
memberikan laporan setelah melaksanakan tugas.

Semarang, 8 Maret 2020

Dekan



Dra. B. Tyas Susanti, MA., PhD
NIDN. 626076501

BERITA ACARA REVIEW
PENELITIAN (KARYA DESAIN)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Pada hari ini, hari: Senin tanggal: 16 maret 2020, telah diadakan review penelitian kegiatan penelitian karya desain dengan judul:

**EKSPRESI MAKNA PELAYANAN PADA PERANCANGAN BANGUNAN KANTOR
PEMERINTAH**

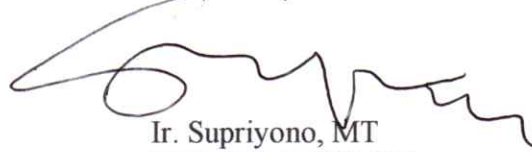
Kasus studi: Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hasil review sebagai berikut:

1. Lebih diperdalam lagi pada kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
2. Saran perlu dikembangkan lagi agar supaya penelitian tersebut tetap bersifat terbuka dan dapat diteliti oleh orang lain.

Semarang, 16 Maret 2020

Reviewer 1,



Ir. Supriyono, MT
NPP. 058.1.1987.021

BERITA ACARA REVIEW
PENELITIAN (KARYA DESAIN)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Pada hari ini, hari : Senin, tanggal : 16 Maret 2020, telah diadakan review hasil penelitian dengan judul:

**EKSPRESI MAKNA PELAYANAN PADA PERANCANGAN BANGUNAN KANTOR
PEMERINTAH**

Kasus studi: Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hasil review sebagai berikut:

- Di bab V (pembahasan) sebaiknya ditambahkan pembahasan berkait dengan rencana implementasi “makna pelayanan” pada bentukan arsitekturnya sesuai dengan teori-teori yang ada di bab II.
- “makna pelayanan” rencananya diterapkan di bagian mana saja dalam bentukan arsitektur Kantor Bupati ?

Reviewer 1

NPP.

Semarang, 16 Maret 2020

Reviewer 2,



Ir. IM. Tri Hesti M, MT

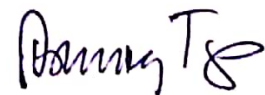
NPP. 058.1.1989.048

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN KARYA DESAIN
EKSPRESI MAKNA PELAYANAN PADA PERANCANGAN BANGUNAN KANTOR
PEMERINTAH
KASUS STUDI: KANTOR BUPATI DAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

1. Judul Penelitian : Penerapan Konsep Pelayanan Pada Perancangan Bangunan Kantor Pemerintah, Kasus studi: Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Rumpun : Arsitektur/Budaya/Desain/Makna
3. Ketua Peneliti :
- a. Nama : Riandy Tarigan
- b. NPP/NIDN : 058.1.1991.097/0629056402
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Pangkat/Gol. Ruang : Penata/IV^aA
- e. Program Studi : Prodi Arsitektur
- f. Fakultas : Fakultas Arsitektur dan Desain
- g. Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata
- h. E-mail : riandy@unika.ac.id
4. Nama Anggota Peneliti : 1. Bonifasio Bayu Senasaputro, ST., MT (NPP.058.1.2018.323)
- Lama Penelitian : 5 (lima) bulan
- Sumber Biaya : Mandiri
- Besar dana : Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Semarang, 8 Juli 2020

Ketua Peneliti/



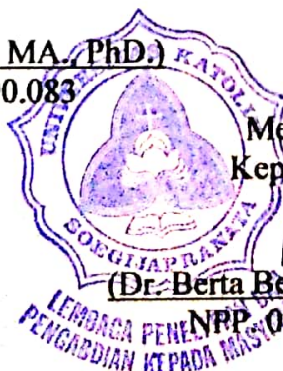
Ir. Riandy Tarigan, MT
NPP. 058.1.1991.097

Mengetahui,
Dean FAD,



(Dra. B. Tyas Susanti, MA., PhD.)
NPP. 058.1.1990.083

Mengetahui,
Kepala LPPM,



(Dr. Berta Berti Retnawati, MSi)
NPP. 058.1.1998.219

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Halaman Surat Tugas	ii
Berita Acara Review	iii
Halaman Pengesahan	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Abstraks	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	2
1.4 Lingkup Pembahasan	2
1.5 Alur Pikir.....	3
1.6 Sistematika pembahasan	4
BAB II Kajian Teoretik	5
2.1 Aspek Pelayanan	5
2.2 Bahasa, Ekspresi dan Makna.....	6
2.3 Implementasi Makna Pelayanan ke dalam Fungsi, Ruang dan Bentuk Bangunan Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah Kota Magelang, Jawa Tengah.....	11
BAB III Metode/Proses Desain	13
3.1 Dasar Metode Desain	13

3.2 Metode Desain.....	13
BAB IV Pendataan.....	14
4.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah	14
4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Sleman	15
4.3 Deskripsi Lokasi.....	15
4.4 Data Tapak	16
4.5 Data Regulasi Bangunan	16
BAB V Pembahasan	18
5.1 Kebutuhan Ruang dan Zonasi Ruang.....	18
5.2 Analisis Luasan Bangunan	19
5.3 Konsep Zonasi Ruang	21
5.4 Konsep Fungsi Bangunan.....	22
5.5 Pengembangan konsep tata massa.....	24
5.6 Pengembangan konsep bentuk bangunan.....	24
5.7 Pengembangan konsep wajah bangunan	25
5.8 Pengembangan Konsep Ruang Luar	26
BAB VI Hasil Rancangan.....	28
6.1 Denah	28
6.2 Tampak dan Potongan.....	29
6.3 Perspektif.....	30
BAB VII Kesimpulan	31
7.1 Kesimpulan.....	31
7.2 Saran.....	31
Daftar Pustaka	32

DAFTAR TABEL

Tabel V.1	Program dan Luasan Ruang Lantai 1	19
Tabel V.2	Program dan Luasan Ruang Lantai 2	20
Tabel V.3	Program dan Luasan Ruang Lantai 3	20
Tabel V.4	Program dan Luasan Lantai Basement.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Diagram Alur Pikir.....	3
Gambar II.1	Triadic – Semiotika Pierce	7
Gambar II.2	Hubungan tanda dan makna melalui fungsi dan bentuk arsitektur	8
Gambar II.3	Diagram relasi antara fungsi dan bentuk.....	11
Gambar IV.1	Diagram Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Sleman	15
Gambar IV.2	Letak Lokasi Tapak	16
Gambar V.1	Konsep Zoning	22
Gambar V.2	Konsep Sirkulasi	23
Gambar V.3	Konsep Sumbu	24
Gambar VI.1	Denah	28
Gambar VI.2	Tampak dan Potongan 1	29
Gambar VI.3	Gambar Tampak dan Potongan 2	29
Gambar VI.4	Perspektif.....	30

ABSTRAK

Perancangan bangunan perkantoran, khususnya bangunan pemerintahan mempunyai karakter tersendiri. Fungsi pelayanan menjadi signifikan terhadap fungsi pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah dalam dekade saat ini bukan bentuk kekuasaan yang menjadikan fungsi tersebut lebih tinggi dari masyarakat dan mendudukkan kantor tersebut tertutup bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan landasan dalam pengembangan desain fungsi kantor di pemerintahan daerah, khususnya di Provinsi DIY yang mempunyai karakteristik budaya Jawa yang kuat. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan kajian teoritik terhadap fungsi pelayanan yang terkait dengan budaya Jawa. Kajian teoretik tersebut dikembangkan berdasarkan pada kondisi budaya masyarakat di lapangan. Selanjutnya temuan tersebut menjadi dasar perancangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangunan perkantoran merupakan bagian dari fungsi bangunan yang telah diklasifikasi dalam Undang-undang Bangunan Gedung no. 28 Tahun 2001. Fungsi bangunan perkantoran merupakan bagian fungsi usaha yang terdiri dari fungsi perdagangan, industri, dan jasa. Fungsi kantor merupakan bagian dari fungsi jasa yang terkait dengan kegiatan pelayanan transaksi uang dan barang. Fungsi kantor pemerintah merupakan kegiatan pelayanan jasa non transaksi uang dan barang, melainkan diklasifikasikan sebagai jasa pelayanan administratif kepada masyarakat, seperti jasa pelayanan perizinan, pembayaran dan pelayanan administrasi lainnya.

Selain sebagai bagian dari fungsi pelayanan, kantor pemerintah mempunyai fungsi pengaturan dan pengelolaan daerah, dalam hal ini adalah fungsi kantor kepala daerah. Kantor kepala daerah terdiri dari fungsi pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai fungsi pengaturan dan pengelolaan pembangunan di daerah. Adanya fungsi pengaturan dan pengelolaan, maka fungsi kekuasaan juga menjadi bagian dari fungsi kantor bupati dan sekretaris di Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

Perkembangan fungsi bangunan kantor pemerintah dipengaruhi berkembang dari dua sudut pandang ekstrim yakni sebagai bagian dari pelayanan masyarakat dengan bagian cari kekuasaan dan birokrasi. Dua aspek tersebut berpengaruh terhadap pengembangan arsitektur bangunan kantor pemerintah. Beberapa tahun yang lalu pendekatan kekuasaan pada bangunan perkantoran pemerintah diperlihatkan pada ekspresi bangunan dan tata letak bangunan terhadap tapak dan lingkungannya. Bentuk bangunan menggunakan bangunan tradisional bentuk atap joglo dan atau kolonial. Komposisi bangunan utama berada pada aksis yang kuat. Lokasi yang menunjukkan ketidakmudahan dalam akses. Secara makna, bangunan tersebut menunjukkan ekspresi kekuasaan dan birokrasi yang kuat. Fungsi pelayanan berada pada posisi terendah.

Fenomena praktek pelayanan pemerintah semakin meningkat sehubungan dengan perkembangan upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Upaya peningkatan dalam kecepatan dan kemudahan perizinan, transparansi (keterbukaan), tanggap terhadap pelayanan, dan sebagainya. Fenomena tersebut berpengaruh terhadap perubahan makna ruang dan bentuk

bangunan. Dengan demikian, isu yang muncul berdasarkan fenomena adalah makna pelayanan terhadap ruang dan bentuk bangunan kantor pemerintah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada fenomena dan isu, perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk bangunan kantor bupati mempunyai makna fungsi pelayanan?
2. Bagaimana tata ruang dalam pada bangunan kantor tersebut diwujudkan berdasarkan makna fungsi pelayanan?
3. Bagaimana pengelolaan ruang luar pada bangunan kantor tersebut mampu mengakomodasi makna fungsi pelayanan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian adalah:

- a. Mengembangkan susunan ruang, bentuk bangunan dan ruang luar Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah yang mengekspresikan makna pelayanan bagi masyarakat tanpa meninggalkan aspek birokrasi.

2. Manfaat

- a. Kontribusi terhadap masyarakat adalah menghasilkan produk desain yang dapat menghasilkan acuan bagi perkembangan desain selanjutnya.
- b. Kontribusi teorietik adalah menambah perbendaharaan metode dalam pengembangan desain.
- c. Kontribusi terhadap empirik yaitu menambah wawasan pengetahuan terhadap penguasaan dalam merancang bangunan.

1.4 Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan meliputi :

1. Tata ruang dalam (lingkup bangunan)

Tata ruang dalam yang terkait dengan pemaknaan aspek pelayanan merupakan bagian yang penting untuk dikembangkan, yang terdiri dari komposisi ruang. Lingkup ini menekankan pada struktur ruang yang terbentuk akibat dari signifikansi pelayanan.

2. Tata ruang luar (lingkup tapak)

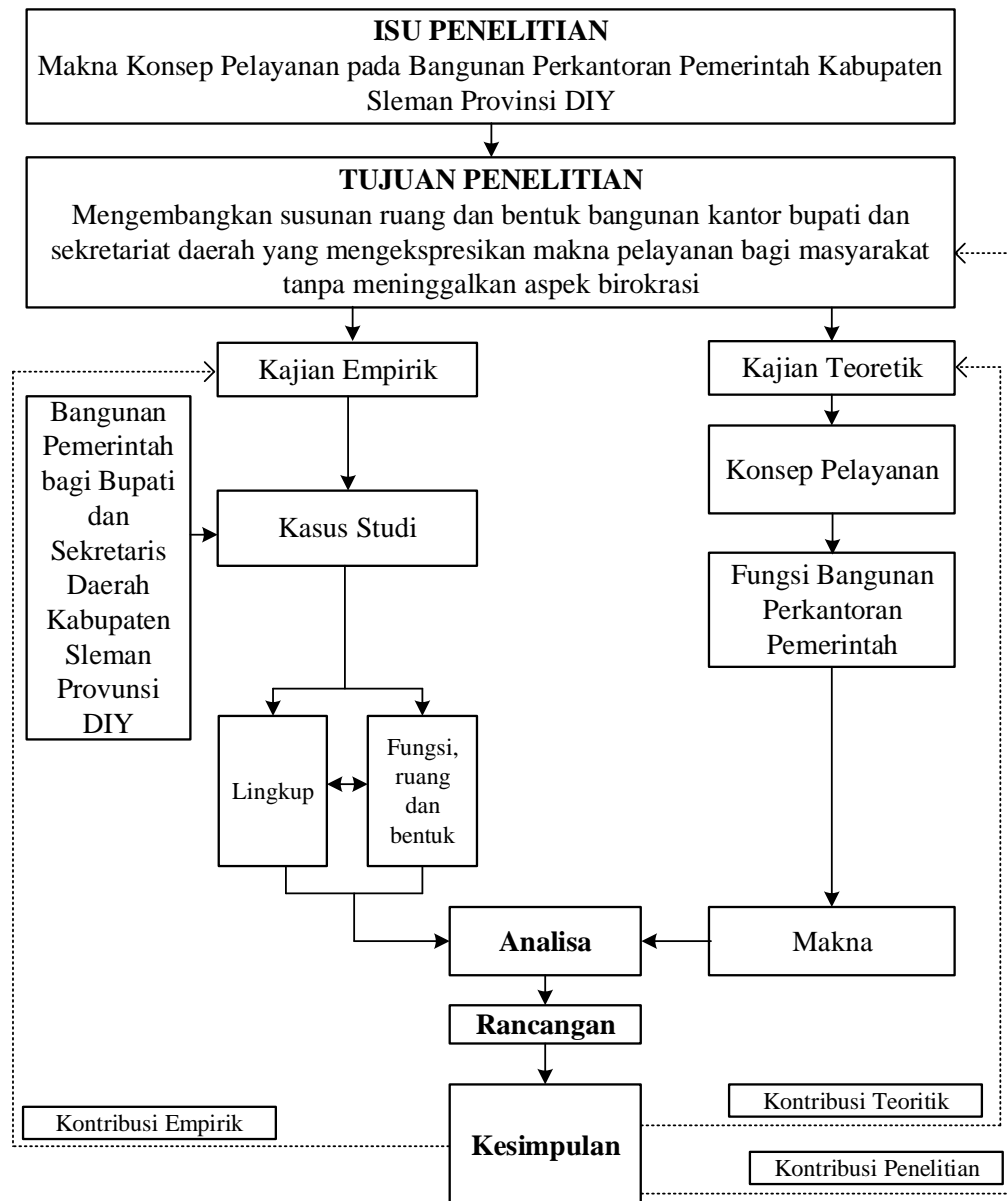
Lingkup ini terdiri dari elemen-elemen pembentuk ruang, yaitu massa bangunan, vegetasi, jalan, taman, parkir dan lain lain. Elemen pada lingkup tapak dikembangkan berdasarkan pada aspek pelayanan.

3. Bentuk bangunan (lingkup sosok)

Bentuk bangunan meliputi bentuk dan sosok bangunan.

1.5 Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian ini diperlihatkan pada diagram di bawah ini.



Gambar I.1 Diagram Alur Pikir

1.6 Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebagai berikut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah yang ditetapkan, tujuan dan manfaat dan lingkup pembahasan sebagai batasan penelitian.

BAB 2 : KAJIAN TEORETIK

Kajian teoritik adalah kajian terhadap berbagai teori yang melandasi aspek pelayanan dan dielaborasi berdasarkan pada kondisi empirik yaitu fungsi perkantoran pemerintah.

BAB 3 : METODE DESAIN

Bab ini memuat tentang tahapan yang dilakukan dalam mengakomodasi konsep pelayanan di dalam perancangan bangunan.

BAB 4 : DATA

Bab ini memuat data lapangan sebagai dasar dalam perancangan bangunan

BAB 5 : PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisis kebutuhan jenis ruang, dimensi ruang, dan konsep struktur ruang. Pembahasan tersebut terkait dengan aspek pelayanan yanterbagi atas analisis ruang dalam, ruang luar dan bentuk bangunan.

BAB 6 : KESIMPULAN

Bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan masalah yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

2.1 Aspek Pelayanan

Bangunan perkantoran diklasifikasikan ke dalam fungsi bangunan usaha. Bangunan fungsi usaha terdiri dari dari fungsi perdagangan, fungsi perkantoran, fungsi industri, fungsi jasa, fungsi penyimpanan (gudang, bangunan parkir) (UU BG No. 28, tahun 2001). Fungsi usaha pada prinsipnya adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan pelayanan terhadap transaksi ekonomi. Fungsi perkantoran meliputi kantor bank, kantor konsultan, kantor yang bersifat bisnis. Pada umumnya fungsi perkantoran bersifat jasa, meskipun usaha jasa tidak selalu dimasukkan ke dalam fungsi perkantoran, misal jasa pengiriman barang, jasa tata boga, jasa tata busana dan lain sebagainya. Fungsi perkantoran merupakan fungsi pelayanan terhadap kegiatan jasa yang berdasarkan pada fungsi bisnis.

Usaha perkantoran swasta berbeda dengan perkantoran pemerintah. Fungsi perkantoran swasta bersifat privat yang berarti pelayanannya bersifat pribadi yang berkaitan dengan bisnis dan ekonomi. Fungsi perkantoran pemerintah bersifat publik. Pelayanan bersifat publik adalah pelayanan terhadap masyarakat yang berkaitan pelayanan non-bisnis. Pelayanan terhadap masyarakat adalah pelayanan terhadap masyarakat secara pribadi maupun kelompok masyarakat (sosial dan bisnis) yang bersifat administratif non-bisnis, misal pengurusan pajak, perizinan, kependudukan dan sebagainya. Fungsi pelayanan publik tidak berhubungan dan transaksi yang berhubungan dengan uang dan barang, melainkan pelayanan yang berhubungan dengan manusia. Kepentingan pelayanan pada perkantoran pemerintah tidak terkait dengan perhitungan untung dan rugi, melainkan pada kualitas pelayanan yaitu transparansi, akuntabilitas, kecepatan dan ketepatan. Unsur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sehingga memberikan dampak positif (sosial, budaya dan ekonomi) terhadap masyarakat menjadi prioritas dalam pelayanannya.

Sistem pelayanan terhadap masyarakat membutuhkan cara pandang baru terhadap kedudukan pemerintahan di dalam masyarakat. Pada era sebelumnya, kantor pemerintah mendudukan diri jauh dari masyarakat menjadi dekat dengan masyarakat. Sebelumnya, kantor pemerintah merupakan suatu bentuk bangunan yang bersifat feodalistik dan jauh dari masyarakat. Masyarakat merasakan kesulitan dalam pengurusan berbagai hal, misal pengurusan perizinan,

kependudukan dan sebagainya. Dalam hal ini dipengaruhi sistem birokrasi yang berbelit dan tidak jelas. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka pendekatan tidak lagi berdasarkan pada feodalisme, namun dibutuhkan perubahan pelayanan yang bersifat egaliter. Pelayanan yang egaliter adalah pelayanan yang dekat dan raman dengan masyarakat yang ditunjukkan dengan birokrasi yang jelas dan tidak berbelit-belit.

Kualitas pelayanan yang berdasar pada transparansi, akuntabilitas, kecepatan, ketepatan serta aspek egaliter dalam bidang administratif yang telah menjadi dasar dalam pelayanan pemerintahan saat ini diekspresikan ke dalam bangunan kantor pemerintahan. Dari ke 5 aspek pelayanan tersebut terdapat 4 aspek yang dapat dikembangkan dalam ekspresi arsitektur, yakni transparansi, kecepatan, ketepatan dan egaliter.

2.2 Bahasa, Ekspresi dan Makna

Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang tidak terlepas dari arti atau makna pada setiap perkataan yang diucapkan. Cabang ilmu bahasa adalah fonologi, gramatikal, sintaksis dan semantik (Chaer, 1994). Dalam bahasa dikenal dengan istilah semantik yaitu cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna, baik makna kata, makna frausa, makna klausa, makna kalimat, maupun makna wacana sebagai satuan bahasa yang lengkap. Dalam suatu bahasa, makna kata saling berhubungan, hubungan ini disebut relasi makna. Ada beberapa jenis makna, antara lain makna leksikal, makna gramatikal, makna denotasi, dan makna konotasi. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, atau makna yang sesuai dengan fungsi alat indera. Makna gramatikal adalah makna yang disebabkan adanya proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Makna suatu kata baru dapat dipahami bila berada dalam suatu konteks kalimat. Makna denotatif adalah sering dikatakan sebagai makna sebenarnya atau makna yang sesuai dengan referensinya, sedangkan makna konotatif adalah makna yang disimbolkan untuk mendapatkan nilai yang berbeda baik positif maupun negatif.

1. Makna menurut Hermeneutika

Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuein yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan (Mulyono, Edi. dkk, 2012). Menurut Hermeneutika, makna dipandang sebagai produk dari tafsiran sebuah teks; simbolik berkaitan dengan relasi-relasi unik antara sebuah obyek dengan 'dunia'.

2. Makna menurut Psikoanalisa

Menurut Psikoanalisis, makna digunakan untuk menjelaskan 'kemauan' dan 'hasrat'. Estetika menggunakannya untuk menjelaskan tingkatan emosi tertentu yang terlibat di dalam sebuah karya.

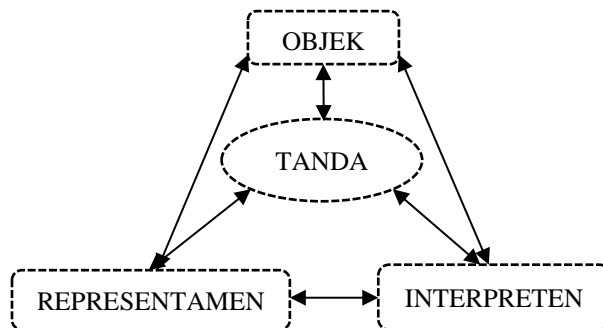
3. Makna menurut Fenomenologi

Fenomenologi menggunakan kata makna dalam pengertian 'esensi' atau 'hakikat' sesuatu.

4. Makna menurut Semiotika

Berdasarkan Semiotika, makna digunakan untuk menjelaskan 'konsep' (signified) di balik sebuah tanda (signifier) (Piliang, 2006). Pengertian makna menurut Saussure adalah sebagai suatu konsep yang dimiliki atau yang terkandung dalam tanda linguistik (Chaer, 1994)

Pesan tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda (*sign*). Setiap tanda diberi makna yang diproduksi oleh manusia/masyarakat berdasarkan wawasan pengetahuan dan akal budi dalam membentuk makna tersebut. Sebaliknya, manusia/masyarakat memahami tanda tersebut tergantung oleh wawasan pengetahuan dan akal budinya. Kemampuan memberi makna tersebut menjadi penting agar pesan-pesan yang disampaikan mempunyai nilai-nilai yang terkandung. Dengan demikian, referent mempunyai peran penting dalam menyusun tanda dan makna yang dilakukan oleh manusia (Nöth, 1990) (Salura, 2015). (Gambar 3.9).

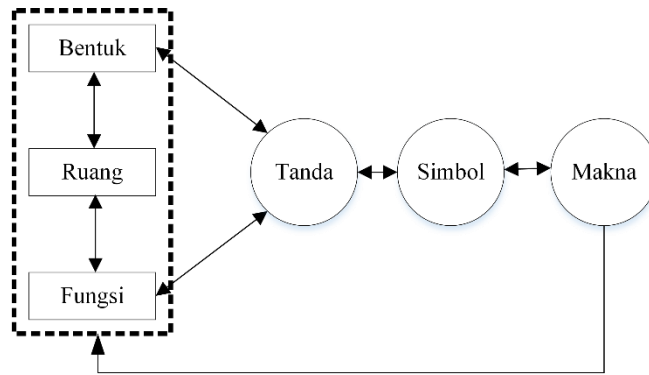


Gambar II.1 Triadic – Semiotika Pierce

5. Makna dalam arsitektur

Tanda dalam arsitektur sebagai dasar dalam mengembangkan komunikasi budayanya tidak terlepas dari aspek fisik. Aspek fisik arsitektur adalah fungsi dan bentuk. Hubungan antara fungsi dengan bentuk merupakan satu kesatuan yang saling mempunyai relasi. Setiap bentuk yang dihasilkan mengandung makna fungsi didalamnya. Sebaliknya, fungsi harus terungkap dan terekspresikan dalam bentuk yang dihasilkan. Hubungan antara tanda dan makna yang terkait dengan fungsi dan bentuk arsitektur diperlihatkan pada Gambar 3.11. Tanda adalah

sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk (merepresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Pierce (Nöth, 1990) terdiri dari ikon, indeks dan simbol. Ikon merupakan tanda yang muncul dari acuan fisiknya. Indeks adalah tanda yang muncul dari hubungan sebab-akibat, sedangkan simbol adalah tanda yang muncul akibat dari kesepakatan. Sifat ikon adalah berhubungan langsung sifat acuan obyeknya. Sifat indeks adalah berhubungan tidak langsung dengan acuan obyeknya, sedangkan sifat simbol berhubungan tidak langsung dengan obyeknya dan bersifat abstrak.



Gambar II.2 Hubungan tanda dan makna melalui fungsi dan bentuk arsitektur

Sumber : Purnama Salura, diolah, 2017

Salura (2015) menyatakan bahwa bentuk terdiri dari ruang, pelingkup dan struktur. Bentuk merupakan perwujudan dari ruang. Demikian juga ruang merupakan perwujudan dari kegiatan atau fungsi yang berada didalamnya. Bentuk dapat diwujudkan apabila ruang tersebut mempunyai pelingkup dan struktur. Berdasarkan pengertian bentuk, maka fungsi, ruang, pelingkup, struktur tidak dapat dipisahkan. Ke empat aspek tersebut selalu menjadi satu kesatuan. Ruang tidak dapat didefinisikan apabila tidak terdapat fungsi didalamnya dan komposisi elemen-elemen pelingkup sebagai pernyataan berbagai kebutuhan dan keinginan dari fungsi dan ruangnya. Ke tiga elemen bentuk (ruang, pelingkup dan struktur) tersebut mempunyai tugas masing-masing. Ruang bertugas sebagai wadah dari kegiatan (kehendak dari fungsi). Pelingkup bertugas memberi batas (*boundary*) dan penyaring (*filter*) sebagai perwujudan terhadap kebutuhan ruang (kehendak ruang) dan mensiratkan bentuk yang abstrak menjadi nyata. Struktur bertugas sebagai kekuatan terhadap bentuk agar dapat terwujud dan dinyatakan. Tampilan bentuk dan ruang 3 dimensional mengacu pada kehendak ruang, komposisi elemen-elemen pelingkup dan pengorganisasian antara elemen-

elemen. Aspek bentuk mempunyai 2 aspek, yaitu aspek pelingkup dan struktur. Di dalam pelingkup terdapat bukaan dan ornamen.

Pelingkup dalam arsitektur merupakan wujud batas dari ruang. Batas tersebut mempunyai tugas-tugas tertentu. Batas ruang mempunyai fungsi yang ganda yaitu satu sisi batas berfungsi sebagai pemisah, sisi lain batas ruang sebagai fungsi penghubung. (Ven, 1991) (Ching, 1979) Menurut Ching (1979), batas ruang tersebut dimulai dari titik, garis, bidang dan ruang. Elemen tersebut dapat disusun sebagai elemen vertikal dan horisontal. Susunan elemen-elemen tersebut menjadikan ruang dan masa terwujud. Meskipun Ching menjelaskan tentang pelingkup, namun penjelasan tentang pelingkup masih bersifat formalistik, materialistik dan tidak mengandung aspek kontekstual. Secara umum, pelingkup secara abstrak mengandung bidang alas/lantai, bidang pembatas/dinding dan bidang menggantung/langit-langit/atap. Thiis-Evensen (1987) memaparkan pelingkup secara detail yang menunjukkan pada objek material yang terdiri dari lantai, dinding dan atap.

Ekspresi dan makna merupakan cara dalam mengkomunikasikan fungsi, ruang dan bentuk terhadap pengamat. Komunikasi yang dilakukan adalah menunjukkan ekspresi ruang dan bentuk yang merupakan makna dari fungsinya. Ekspresi ditunjukkan oleh bangunan. Makna adalah arti dari ekspresi bangunan tersebut. Pengertian ini menunjukkan hubungan timbal balik antara ekspresi dengan makna (Salura, 2016). Dengan demikian, hubungan antara fungsi dengan makna adalah hubungan yang tak terpisahkan. Ekspresi bentuk merupakan tanda. Setiap tanda dapat diartikan apabila tanda itu mempunyai makna. Tanda tersebut merupakan perwujudan dari fungsinya. Makna yang dihasilkan terdiri dari makna sebab-akibat, makna keserupaan dan makna simbolik. Pada kasus ini, makna yang dikaji adalah makna simbolik yang terkait dengan konsep pelayanan.

Makna menurut KBBI adalah adalah “arti”. Kata “makna” digunakan dalam kajian ilmu semiotika, hermeneutika, fenomenologi, dan psikologi. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang tidak terlepas dari arti atau makna pada setiap perkataan yang diucapkan. (Chaer, 1994). Menurut hermeneutika, makna dipandang sebagai produk dari tafsiran sebuah teks; simbolik berkaitan dengan relasi-relasi unik antara sebuah objek dengan 'dunia'. Menurut psikoanalisis, makna digunakan untuk menjelaskan 'kemauan' dan 'hasrat'. Estetika menggunakannya untuk menjelaskan tingkatan emosi tertentu yang terlibat di dalam sebuah karya. Sedangkan fenomenologi menggunakan kata makna dalam pengertian 'esensi' atau 'hakikat' sesuatu. Esensi atau hakekat tersebut dikembangkan oleh Husserl dalam melihat suatu kebenaran

di dalam realitas. Kebenaran bukan merupakan bentuk materi, melainkan bentuk fenomena, suatu peristiwa atau gejala. Kebenaran suatu realitas didapat cara dimahami bukan dijelaskan.

Makna menurut semiotika merupakan perwujudan dari setiap tanda yang hadir di dalam dunia. Hubungan antara tanda dan makna dikembangkan oleh Saussure dan Pierce. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk (merepresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Pierce terdiri dari ikon, indeks dan simbol. Ikon merupakan tanda yang muncul dari acuan fisiknya. Indeks adalah tanda yang muncul dari hubungan sebab-akibat, sedangkan simbol adalah tanda yang muncul akibat dari kesepakatan. Sifat ikon adalah berhubungan langsung sifat acuan objeknya. Sifat indeks adalah berhubungan tidak langsung dengan acuan objeknya, sedangkan sifat simbol berhubungan tidak langsung dengan objeknya dan bersifat abstrak.

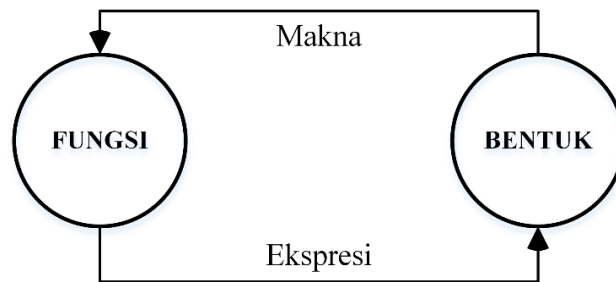
Setiap tanda mengekspresikan tanda tertentu yang dapat dibaca menjadi makna. Makna adalah manifestasi dari tanda, tidak ada tanda apabila tidak ada makna didalamnya. Oleh karena itu tanda dan makna merupakan satu kesatuan. Simbol terwujud atas dasar dari 2 aspek yaitu aspek ide/gagasan dan aspek referensi yang dimiliki oleh penghuni/pengamat/masyarakat berdasarkan pada objek fakta atau pengalaman yang dimiliki. Antara ide dengan acuan tersebut terdapat relasi yang dapat menyatakan simbol tertentu; sehingga simbol, ide dan acuan yang tidak terpisahkan. Ke tiga hal tersebut saling mempengaruhi. Konsep terhadap simbol merupakan gagasan yang dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang sepakat terhadap simbol tertentu. Oleh karena itu, simbol selalu dipengaruhi oleh alam pemikiran manusia dan atau masyarakat pada waktu tertentu.

Dalam bidang arsitektur, Salura membagi makna terdiri dari 3 jenis makna yaitu makna yang mengandung kesetaraan, makna yang mengandung sebab-akibat, dan makna yang mengandung kesepakatan. Makna kesetaraan adalah makna yang dihasilkan mengikuti kepada acuannya. Makna sebab akibat adalah makna yang dihasilkan merupakan akibat yang dari acuannya. Makna sebab-akibat disebut sebagai makna pragmatik. Makna pragmatik adalah makna dari suatu tanda yang dihasilkan dari fungsi tertentu. Makna kesepakatan adalah makna yang bersifat simbolik. Makna yang dihasilkan tidak berhubungan lagi dengan acuannya. Makna mempunyai arti tersendiri berdasarkan pada kesepakatan dalam kelompok masyarakat tertentu.

Pemaknaan terhadap elemen arsitektur merupakan proses penafsiran terhadap setiap benda yang dihasilkan. Setiap tanda selalu menghadirkan pesan dalam bentuk simbol-simbol untuk dapat

dipahami oleh pengamat. Pemaknaan pada arsitektur berdasarkan bahwa suatu benda budaya selalu mempunyai ekspresi berdasarkan pada konsep yang terdapat benda tersebut. Ekspresi adalah pesan yang diungkapkan oleh setiap benda sebagai suatu tanda untuk menjelaskan maknanya.

Moustafa (1988) menyatakan bahwa relasi antara fungsi dan bentuk diperlihatkan melalui ekspresi dan makna. Penjelasan tentang hubungan antara fungsi dengan bentuk yang terkait antara ekspresi dengan makna dijelaskan pada Gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar II.3 Diagram relasi antara fungsi dan bentuk
Sumber: Moustofa, 1988

Berdasarkan pada relasi fungsi dan bentuk tersebut dapat dijelaskan bahwa ekspresi dimunculkan dalam bentuk. Ekspresi merupakan perwujudan pesan melalui bentuk (sebagai tanda) yang memberikan simbol-simbol tertentu. Pemaknaan (signifikansi) merupakan interpretasi yang dilakukan terhadap bentuk untuk memahami makna-makna yang terjadi pada simbol-simbol yang dihasilkan oleh bentuk tersebut.

2.3 Implementasi Makna Pelayanan ke dalam Fungsi, Ruang dan Bentuk Bangunan Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah Kota Magelang, Jawa Tengah

Pada bab 2.1 telah diuraikan tentang pengertian tentang makna pelayanan yang terdiri dari transparansi, kecepatan, ketepatan dan egaliter. Ke empat aspek tersebut dapat dikembangkan ke dalam ranah arsitektur yang selanjutnya makna arsitektur tersebut dikembangkan dalam ruang dan bentuk arsitektur. Elemen bentuk arsitektur terdiri dari elemen atap, dinding dan lantai.

1. Tranparansi

Transparansi adalah keterbukaan. Keterbukaan tersebut memperlihatkan bahwa proses pelayanan mesti dapat diketahui oleh publik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Pengertian dalam arsitektur, transparansi adalah keterbukaan yang terjadi pada dinding, sehingga dinding mempunyai tingkat kualitas keterbukaan yang tinggi. Dengan adanya keterbukaan tersebut, maka kegiatan yang terjadi dapat dilihat dari pandangan masyarakat. Kegiatan yang terjadi di dalam diekspose agar dapat diketahui oleh pandangan

orang yang berada di luar bangunan atau dari dalam bangunan. Keberadaan bukaan diterapkan oleh material, seperti kaca yang tembus pandang atau tanpa material apapun.

2. Kecepatan

Dalam pelaksanaan birokrasi kecepatan merupakan faktor penting dalam mutu pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Kecepatan dalam birokrasi diperlihatkan pada kemudahan dan tidak berbelit-belit dalam pengurusan berbagai hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Proses yang terjadi pengurusan perizinan dan pembuatan surat yang terkait dengan kependudukan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek. Dengan demikian, ada 2 unsur kecepatan yang diwujudkan yaitu kemudahan dan waktu.

Kemudahan diwujudkan dalam pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya yang tidak berbelit-belit. Dalam hal ini ada kejelasan dalam sirkulasi yang diperlihatkan pada tanda-tanda berupa arah dan tata letak ruang.

Bentuk sirkulasi yang berbentuk garis lurus menuju ke lokasi ruang didukung oleh tanda-tanda penunjuk yang ditempatkan pada tempat tertentu, sehingga manusia yang melakukan pergerakan dapat dilakukan secara cepat. Kemudahan pencapaian ditunjukkan pada elemen lantai dan sarana untuk mencapainya yaitu tangga, ramp, eskalator atau lift. Kemudahan tersebut juga didukung oleh keselamatan dalam melakukan pergerakan, seperti material lantai dan balustrade sebagai pegangan dalam melakukan pergerakan balustrade tidak hanya diletakkan pada tangga melainkan berada pada ruang sirkulasi pada lorong maupun ramp.

Kecepatan juga ditunjukkan pula pada susunan ruang yang mudah dicapai. Fungsi-fungsi ruang yang berhubungan.

3. Egaliter

Egaliter ditunjukkan keberadaan bentuk bangunan yang dinamis, menekankan nilai modern serta tidak berafiliasi secara langsung dengan bentuk rumah tradisional Jawa secara menyeluruh. Sumbu aksis yang tidak terlalu kuat dalam perletakan bangunan serta dalam perencanaan tapak.

Egaliter ditunjukkan pula pada tata ruang yang dinamis, namun perletakan ruang yang khusus berhubungan langsung dengan masyarakat lebih ditekankan pada aspek pencapaian yang mudah dan kejelasan arah.

BAB III

METODE/PROSES DESAIN

3.1 Dasar Metode Desain

Dasar metode desain adalah berdasarkan kondisi lingkungan spesifik bangunan perkantoran yang berada pada kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Sleman. Bangunan perkantoran bupati dan sekretaris daerah merupakan bangunan baru yang masih menjadi bagian dari bangunan lama. Bangunan gedung ini merupakan perluasan bangunan lama yang sudah tidak lagi memadai.

3.2 Metode Desain

Metode desain adalah tahapan dalam merancang bangunan. Tahapan tersebut adalah:

1. Pengamatan lingkungan fisik bangunan dan tata ruang tapak sebagai bagian dari satu kesatuan rancangan.
2. Menyusun rancangan pencapaian kepada bangunan dan menyusun tata ruang tapak yang mendukung pencapaian baik dari kendaraan maupun pejalan kaki sebagai perwujudan dari kecepatan pelayanan.
3. Menyusun kebutuhan ruang dan dimensi ruang.
4. Menyusun konsep zonasi dan struktur ruang.
5. Menyusun konsep kinerja ruang (kenyamanan dan keselamatan ruang).
6. Menyusun konsep tata massa.
7. Menyusun karakteristik bidang dinding, lantai dan atap berdasarkan pada makna transparansi, kecepatan dan egaliter.

BAB IV PENDATAAN

4.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah

1. Visi Kabupaten Sleman

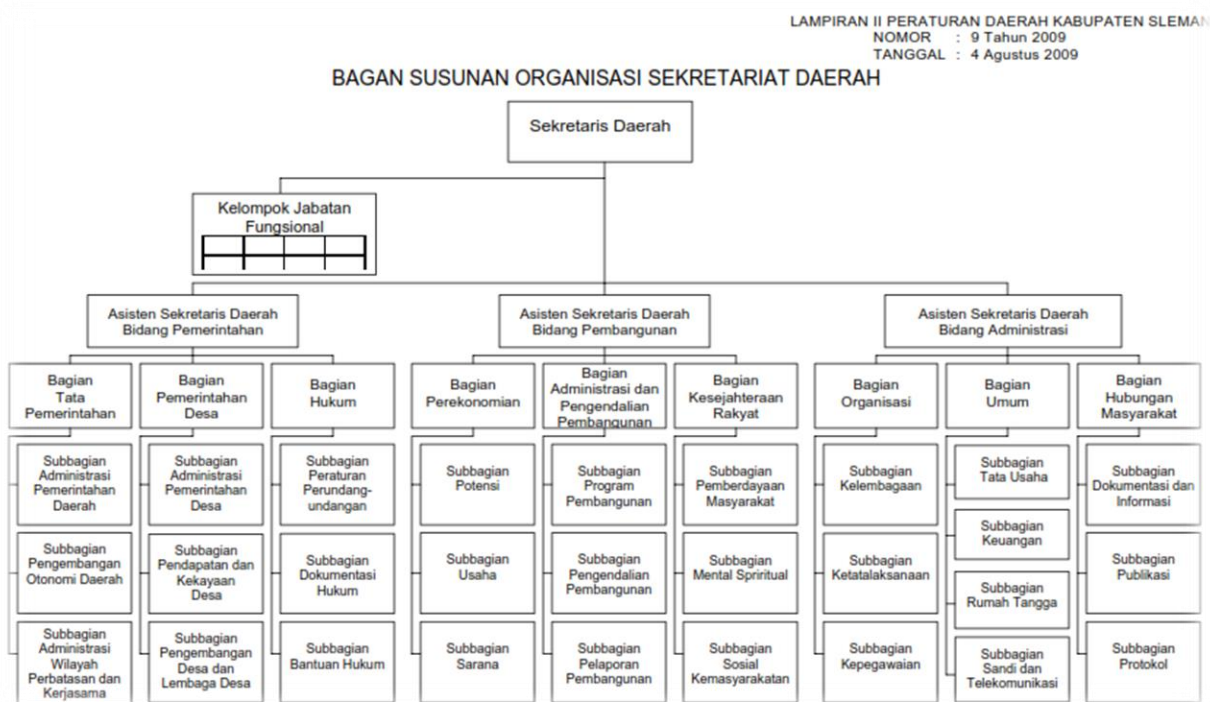
- d. Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (kabupaten cerdas) pada tahun 2021.

2. Misi Kabupaten Sleman

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- d. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- e. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Sleman

Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:



Gambar IV.1 Diagram Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Sleman

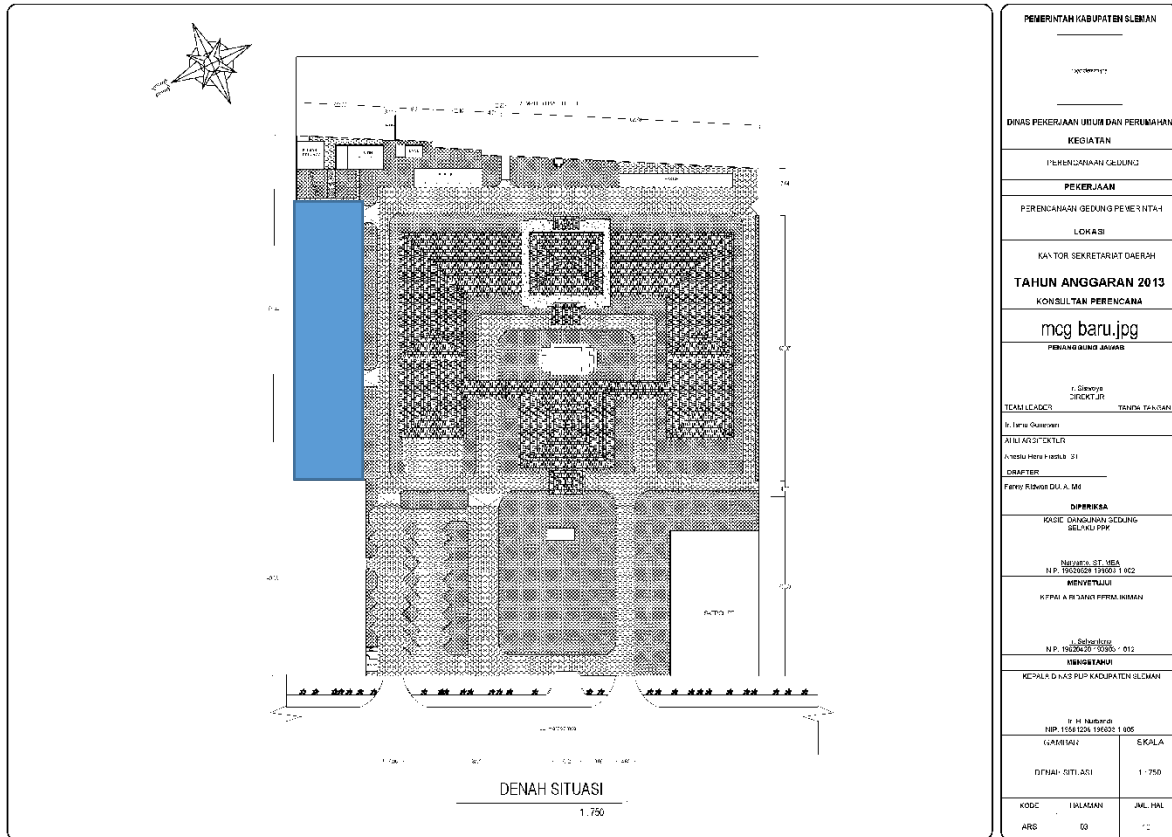
Sumber: Perda Kabupaten Sleman No. 9/ Tahun 2009

4.3 Deskripsi Lokasi

Tapak berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman yang terletak di bagian kiri bangunan lama kantor Bupati dengan bentuk yang memanjang ke belakang. Letak tapak berada di samping kiri dari bangunan kantor bupati. Bentuk bangunan adalah bentuk 'U' dengan orientasi bangunan mengarah ke pendhopo yang berada dibagian depan. Tatanan massa bangunan kantor bupati adalah bentuk massa bangunan yang simetris dengan mengacu pada aksis (sumbu) pada letak pendhopo yang berada di bagian depan. Atap berbentuk limasan. Jumlah lantai bangunan adalah 2 lantai. Bagian depan pendhopo terdapat ruang terbuka dan area parkir di bagian kiri bangunan.

4.4 Data Tapak

Ukuran tapak adalah 127 m x 32 m dengan luas 4.064 m² dengan bentuk persegi empat memanjang ke belakang.



Keterangan:



Lokasi Tapak

Gambar IV.2 Letak Lokasi Tapak
Sumber: DPUP Kab. Sleman, 2013

4.5 Data Regulasi Bangunan

Peraturan intensitas bangunan adalah sebagai berikut :

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah 50%. Dengan demikian luas lantai dasar bangunan maksimal adalah 2.032 m². Apabila dibandingkan dengan kebutuhan luas bangunan total : 2.297,5 m², maka bangunan dibangun cukup 2 lantai.
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah 0,8, sehingga luas bangunan maksimal adalah 0,8 x 4.064 m² : 3.712 m². Hal ini mengindikasikan bahwa apabila dibandingkan dengan luas

bangunan yang dihitung berdasarkan kebutuhan masih memenuhi persyaratan maksimal luas bangunan.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Kebutuhan Ruang dan Zonasi Ruang

Konsep tata ruang berdasarkan pada nilai kemanusiaan, hubungan kerja dan interaksi sosial. Dengan landasan tersebut maka ruang disusun berdasarkan pada konsep hirarki serta konsep hubungan dan interaksi. Pembagian ruang tersebut dikembangkan pada prinsip vertikal dan horisontal.

A. Jenis dan pembagian ruang

Berdasarkan pada konsep di atas maka perletakan ruang berdasarkan pada pembagian ruang per lantai. Pengelompokan ruang berdasarkan pada lantai adalah sebagai berikut :

1. Lantai 1 adalah lantai yang digunakan untuk fungsi ruang yang berhubungan dengan publik dan servis, terdiri dari :
 - Lobby
 - Ruang Media Center,
 - Ruang Staf Pimpinan
 - Musholla
 - Kantin
 - Ruang untuk Merokok
 - Ruang Laktasi
 - Ruang Servis (gudang, janitor, lavatory, house keeping, dan ruang laktasi) (180m²).
2. Lantai 2 adalah lantai yang digunakan untuk fungsi perkantoran yang bersifat privat. Lantai dua ini digunakan untuk pejabat pemerintah Kabupaten Sleman, terdiri dari :
 - Ruang Konperensi Pers
 - Ruang Sekretaris Daerah
 - Ruang Asisten Sekda
 - Ruang Staf Ahli
 - Lobby dan CS
 - Aula VIP
 - Ruang laktasi

- Ruang untuk Perokok
 - Ruang servis (gudang, janitor, lavatory, pantry, house keeping, dan smoking room)
3. Lantai Tiga adalah lantai yang digunakan
- Ruang Bupati
 - Ruang Kantor Bupati
 - Ruang Tamu
 - Ruang Rapat
 - Ruang Smart Room
4. Lantai Basement adalah lantai yang digunakan untuk parkir mobil yang menggunakan bangunan ini yang setara dengan pejabat eselon 1 dan 2, yaitu:

5.2 Analisis Luasan Bangunan

A. Kebutuhan dan luasan ruang

Program ruang Gedung Kantor Bupati dan Sekretaris Daerah berdasarkan per lantai adalah sebagai berikut :

1. Lantai Satu

Program ruang pada lantai 1 dapat dilihat pada Tabel V.1 di bawah ini.

Tabel V.1 Program dan Luasan Ruang Lantai 1

No.	Nama Ruang	Jumlah	Luas/unit	Luas	Luas
1.	Ruang Staf Pimpinan dan Arsip	1	286,39 m ²	286,39 m ²	286,39 m ²
2.	Ruang Lobby & CS	1	149 m ²	149 m ²	149 m ²
3.	Ruang Media Center	1	48 m ²	48 m ²	48 m ²
4.	Ruang Untuk Perokok	1	32 m ²	32 m ²	32 m ²
5.	Ruang Laktasi	1	39 m ²	39 m ²	32 m ²
6.	Kantin	1	169,54 m ²	169,54 m ²	169,54 m ²
7.	Musholla	1	112,5 m ²	112,5 m ²	112,5 m ²
6.	Ruang Servis				180 m²
a.	Gudang	1	15 m ²	30 m ²	m ²
b.	Pantry	1	9 m ²	18 m ²	m ²
c.	Janitor	1	9 m ²	18 m ²	m ²
d.	House Keeping	1	12 m ²	24 m ²	m ²
e.	Lavatory	1	25,5 m ²	18 m ²	m ²

2. Lantai Dua

Program ruang pada lantai 2 dapat dilihat pada Tabel V.2 di bawah ini.

Tabel V.2 Program dan Luasan Ruang Lantai 2

No.	Nama Ruang	Jumlah	Luas	Luas
1.	Ruang Sekda			109 m ²
	a. Ruang Sekda	1	30 m ²	
	b. Lavatory	1	4 m ²	
	c. Ruang Istirahat	1	9 m ²	
	d. Ruang administrasi	1	28 m ²	
	f. Ruang Rapat	1	45,5 m ²	
	g. Ruang Tamu	1	24,34 m ²	
2.	Ruang Asisten Sekda			207 m ²
	a. Ruang Asisten Sekda	3	89,73 m ²	
	d. Ruang Tamu	3	99,57 m ²	
3.	Ruang Staf Ahli			114 m ²
	a. Ruang Staf Ahli	3	105,2 m ²	
	b. Ruang administrasi/asisten	1	43,6 m ²	
	c. Ruang Rapat Kecil	1	9 m ²	
4.	Ruang Lobby & CS	1	48 m ²	m ²
5.	Ruang Konperensi pers	1	11,44 m ²	m ²
6.	Aula untuk VIP	1	113,6 m ²	m ²
7.	Ruang Transisi	1	62,99 m ²	m ²
10.	Ruang Servis			41,4 m ²
	a. Pantry	1	9 m ²	
	b. Lavatory	1	40,5 m ²	

3. Lantai Tiga

Program ruang pada lantai 3 dapat dilihat pada Tabel V.3 di bawah ini.

Tabel V.3 Program dan Luasan Ruang Lantai 3

No.	Nama Ruang	Jumlah	Luas	Luas
1.	Ruang Bupati			247,5 m ²
	a. Ruang Bupati	1	42,5 m ²	
	b. Lavatory	1	4 m ²	
	c. Ruang Istirahat	1	18,5 m ²	
	d. Ruang administrasi	1	22,5 m ²	
	f. Ruang Tamu	1	20 m ²	
	h. Ruang Tunggu	1	22,5 m ²	
2.	Ruang Wakil Bupati			140 m ²
	a. Ruang Kantor Wabup	1	33,84 m ²	
	b. Lavatory	1	4 m ²	

No. Nama Ruang	Jumlah	Luas	Luas
c. Ruang Istirahat	1	14,06 m ²	
d. Ruang administrasi	1	15 m ²	
f. Ruang Tamu dan Ruang Tunggu	1	130 m ²	
g. Ruang Tunggu	1	15 m ²	
8. Ruang Smart Room	1	65 m ²	30 m ²
9. Ruang Lobby & CS	1	130 m ²	400 m ²
12. Ruang Servis			180 m ²
a. Gudang	1	30 m ²	
b. Pantry	1	18 m ²	
c. Janitor	1	18 m ²	
d. House Keeping	1	24 m ²	
e. Lavatory	1	18 m ²	

4. Basement

Program ruang pada basement dapat dilihat pada Tabel V.4 di bawah ini.

Tabel V.4 Program dan Luasan Lantai Basement

No. Nama Ruang	Jumlah	Luas/unit	Luas	Luas
1. Area parkir (Basement)	1	400 m ²	400 m ²	400 m ²

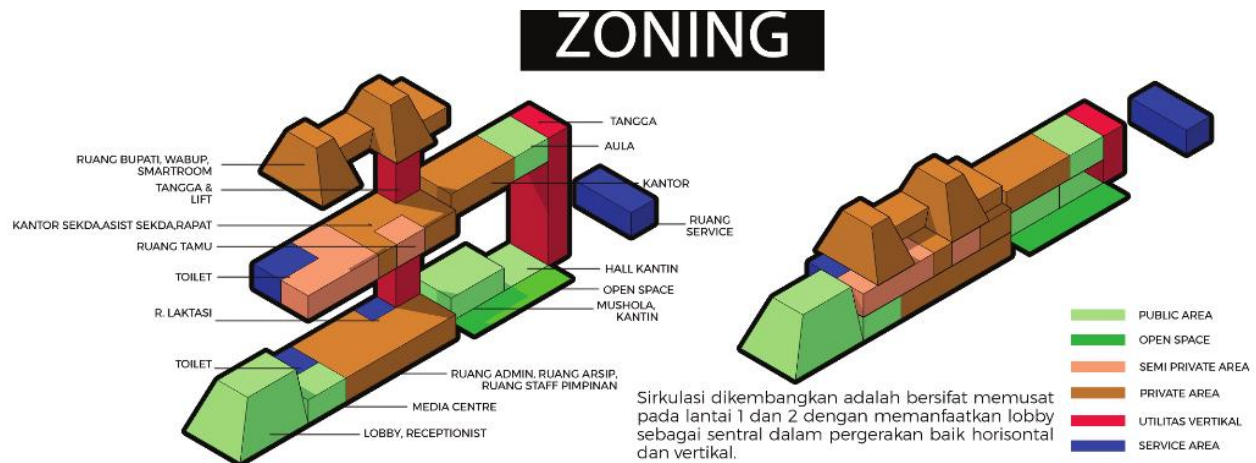
5.3 Konsep Zonasi Ruang

A. Hirarki ruang

Pembagian ruang berdasarkan pada hirarki didasarkan atas level kedudukan didalam struktur organisasi. Pada level pertama adalah kegiatan administratif umum dan pelayanan publik. Pada level ke dua merupakan kegiatan pimpinan administratif. Pada level ke tiga adalah pimpinan kebijakan.

B. Hubungan Kerja dan Interaksi Sosial

Konsep hubungan kerja didasarkan atas hubungan berdasarkan pada struktur organisasi yang diperlihatkan pada susunan ruang yang saling berhubungan. Sebagai contoh : ruang sekretaris daerah bersebelahan dengan ruang asisten sekda. Ruang interaksi sosial ditunjukkan ruang yang berhubungan dengan publik yaitu ruang media center, ruang staf pimpinan dan kantin ruang tersebut diletakkan pada lantai satu.



Gambar V.1 Konsep Zoning
 Sumber: Hasil pengembangan, 2020

5.4 Konsep Fungsi Bangunan

1. Konsep Kenyamanan Ruang

- a. Kenyamanan ruang diperlihatkan pada konfigurasi ruang berdasarkan pada struktur organisasi pemerintah daerah serta koordinasi, sehingga tata ruang diatur berdasarkan struktur yang dapat menciptakan hubungan ruang yang efektif.
- b. Kenyamanan ruang dikembangkan dengan daya dukung penghawaan buatan dengan pengkondisian ruang yang disesuaikan dengan kondisi ruang.

2. Konsep Keselamatan dan Keamanan Ruang

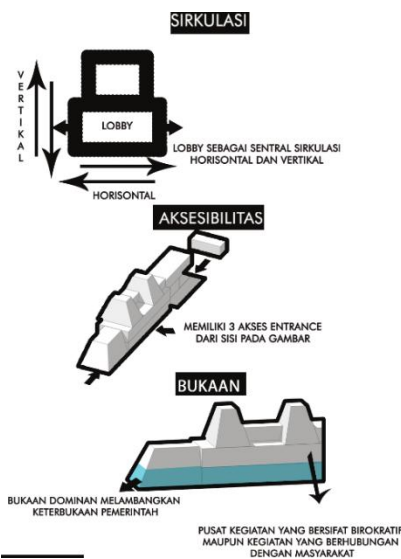
- a. Keselamatan terhadap bupati, wakil bupati dan sekretaris sebagai pimpinan yang mempunyai kedudukan tertinggi di kabupaten merupakan prioritas utama. Bangunan harus menjamin tingkat keselamatan bagi pemimpin apabila terjadi bencana yang ditimbulkan dari gempa tektonik dan vulkanik serta kebakaran. Oleh karena itu, perencanaan terhadap struktur yang tahan gempa, sistem kelistrikan yang aman serta sistem evakuasi menjadi perencanaan utama dalam sistem keselamatan bangunan.
- b. Penggunaan teknologi sensor pada bangunan pintar yang mendukung terhadap tingkat pengamanan bangunan dari pencurian dan kebakaran. Dengan demikian, penanganan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dan kebakaran dapat diantisipasi sejak dini. Pengendalian tersebut dilakukan di Ruang Pengelolaan Bangunan.

3. Konsep Kesehatan Ruang

- a. Kesehatan ruang dilakukan dengan memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami yang dilakukan secara maksimal pada koridor dan ruang dalam melalui berbagai filter. Pada lantai dasar, dinding menggunakan kaca yang berfungsi untuk memaksimalkan masuknya cahaya ke dalam ruang. pada lantai 2 dan 3, dinding dikembangkan dengan dinding “ke dua”. Fungsi dinding ke dua adalah untuk menurunkan suhu di luar bangunan.

4. Konsep Kemudahan Ruang

- a. Sirkulasi dikembangkan adalah bersifat memusat pada lantai 1 dan 2 dengan memanfaatkan lobby sebagai sentral dalam pergerakan baik horisontal dan vertikal. Lobby terdapat pada bagian depan dan samping bangunan sebagai upaya untuk kemudahan pencapaian dari jalan dan dari bangunan lama.
- b. Aksesibilitas kepada bangunan dapat dicapai melalui depan dan samping kiri dan kanan bangunan sebagai upaya untuk menyatukan seluruh sistem kegiatan yang mengacu kepada bangunan yang dikhususkan untuk bupati, wakil bupati dan sekda. Oleh karena pada lantai dasar perlu dibuka dengan meniadakan dinding pelingkup. Sistem sirkulasi utama melalui koridor luar bangunan.
- c. Bukaan yang dominan serta keleluasaan aksesibilitas pada lantai dasar memperlihatkan keterbukaan pemerintah daerah yang modern dan demokratis sebagai pusat terhadap seluruh kegiatan baik kegiatan yang bersifat birokratif maupun kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.



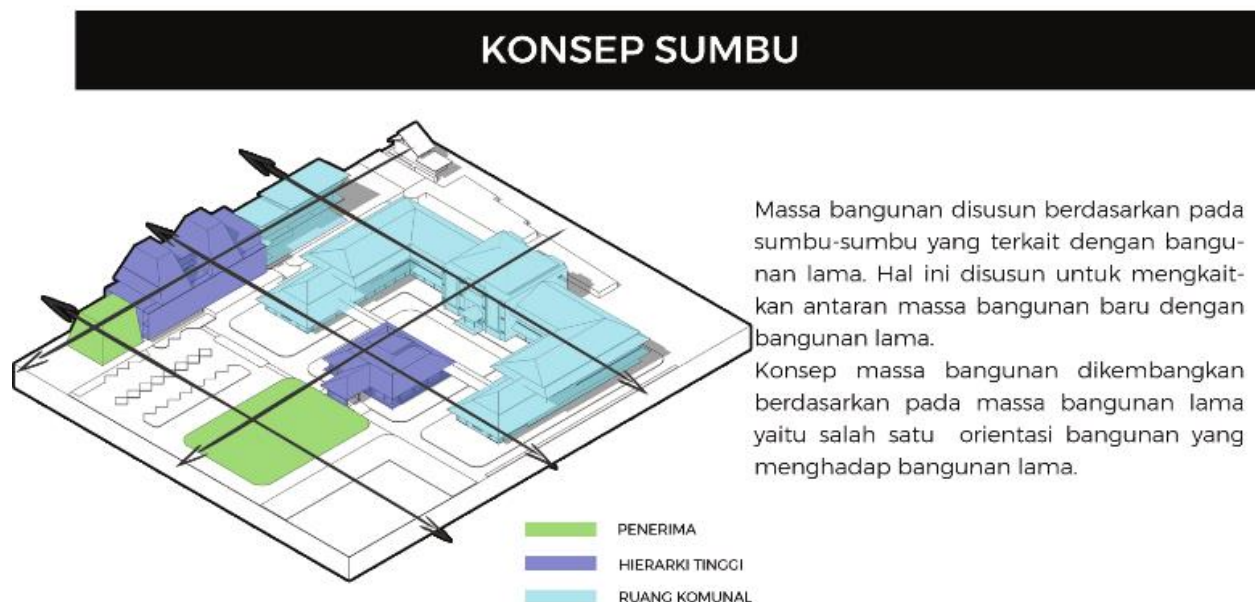
Gambar V.2 Konsep Sirkulasi
Sumber: Hasil pengembangan, 2020

5.5 Pengembangan konsep tata massa

Massa bangunan terdiri dari 3 massa, yaitu 1) massa bangunan utama, 2) massa bangunan penunjang dan 3) massa bangunan pengolahan sampah. Massa bangunan utama adalah massa bangunan untuk kegiatan pengelolaan dan pimpinan. Massa bangunan penunjang merupakan massa yang berhimpitan dengan massa bangunan utama yang berfungsi sebagai kantin dan aula VIP. Massa bangunan lainnya berupa massa yang berfungsi untuk pengelolaan limbah mandiri.

Massa bangunan disusun berdasarkan pada sumbu-sumbu yang terkait dengan bangunan lama. Hal ini disusun untuk mengkaitkan antaran massa bangunan baru dengan bangunan lama.

Konsep massa bangunan dikembangkan berdasarkan pada massa bangunan lama yaitu salah satu orientasi bangunan yang menghadap bangunan lama.



Gambar V.3 Konsep Sumbu
Sumber: Hasil pengembangan, 2020

5.6 Pengembangan konsep bentuk bangunan

1. Pengembangan konsep ekspresi bangunan

Bangunan ini merupakan utama dari bangunan sekitarnya, karena bangunan ini diperuntukkan untuk fungsi pemerintahan yang paling tinggi yaitu bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah. Bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah adalah pemimpin dan pelaksana pembangunan di kabupaten sleman. Kedudukan tersebut menjadi sangat signifikan dalam penerapan bentuk

bangunan. Bentuk bangunan zederhana dan simple menunjukkan perbedaan terhadap bentuk bangunan lama.

Makna keterbukaan dan transparansi diperlihatkan bukaan dinding yang transparan pada lantai dasar menunjukkan makna pemerintahan yang terbuka kepada rakyat dan bersih. bangunan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Konsep egaliter diperlihatkan pada keterpaduan antara modern dan klasik ditunjukkan keterpaduan antara bentuk atap dengan bentuk bangunan yang cenderung sederhana dan simple (tidak neko-neko) dalam bentuk kotak yang dikomposisikan melalui makna bentuknya. Kesederhanaan tersebut juga ditandai dengan sistem sirkulasi yang sederhana dan jelas. Keterpaduan ini adalah simbol dari kemajuan yang tidak pernah berhenti yang didukung oleh dukungan jati diri yang tidak dapat ditinggalkan.

2. Pengembangan konsep bentuk bangunan

Bentuk dibangun berdasarkan pada aspek pencampuran modern dengan lokal. Lokalitas bentuk diperlihatkan dengan 2 buah atap yang berbentuk kotak limasan sebagai perwujudan 2 karakter pimpinan di Kabupaten Sleman yaitu Bupati dan Sekretaris Daerah.

3. Konsep Gedung Pintar

Penggunaan teknologi bangunan pintar yaitu penggunaan sensor untuk pengaturan pencahayaan dan penghawaan buatan yang dapat mengatur secara otomatis tingkat kebutuhan terhadap pencahayaan dan penghawaan buatan.

5.7 Pengembangan konsep wajah bangunan

1. Pengembangan konsep orientasi

Orientasi bangunan menghadap ke 2 sisi yaitu ke depan dan samping kiri. Bangunan menghadap ke jalan dan menghadap ke bangunan lama sebagai satu kesatuan massa bangunan yang tidak berdiri sendiri.

2. Pengembangan konsep ekspresi bangunan

Pelingkup bangunan pada lantai dasar adalah terbuka untuk memberikan bangunan yang mengambang. Sedangkan pelingkup bangunan pada lantai 2 merupakan pelingkup dengan konsep “double skin”. Konsep pelingkup ini merupakan salah satu pemecahan untuk mengendalikan pencahayaan alami.

3. Wajah bangunan menggunakan kaca blok pada lantai bawah untuk memperlihatkan transparansi kegiatan yang terjadi di dalam, sedangkan pada lantai 2 sudah menggunakan dinding ganda sebagai bagian dinding yang sudah mulai tertutup.

5.8 Pengembangan Konsep Ruang Luar

Di sekitar bangunan diberi kolam air menunjukkan bahwa bangunan mempunyai kesan mengambang yang diartikan bahwa bangunan tersebut dinamis sesuai dengan irama pembangunan Kabupaten Sleman yang maju an bergerak ke depan.

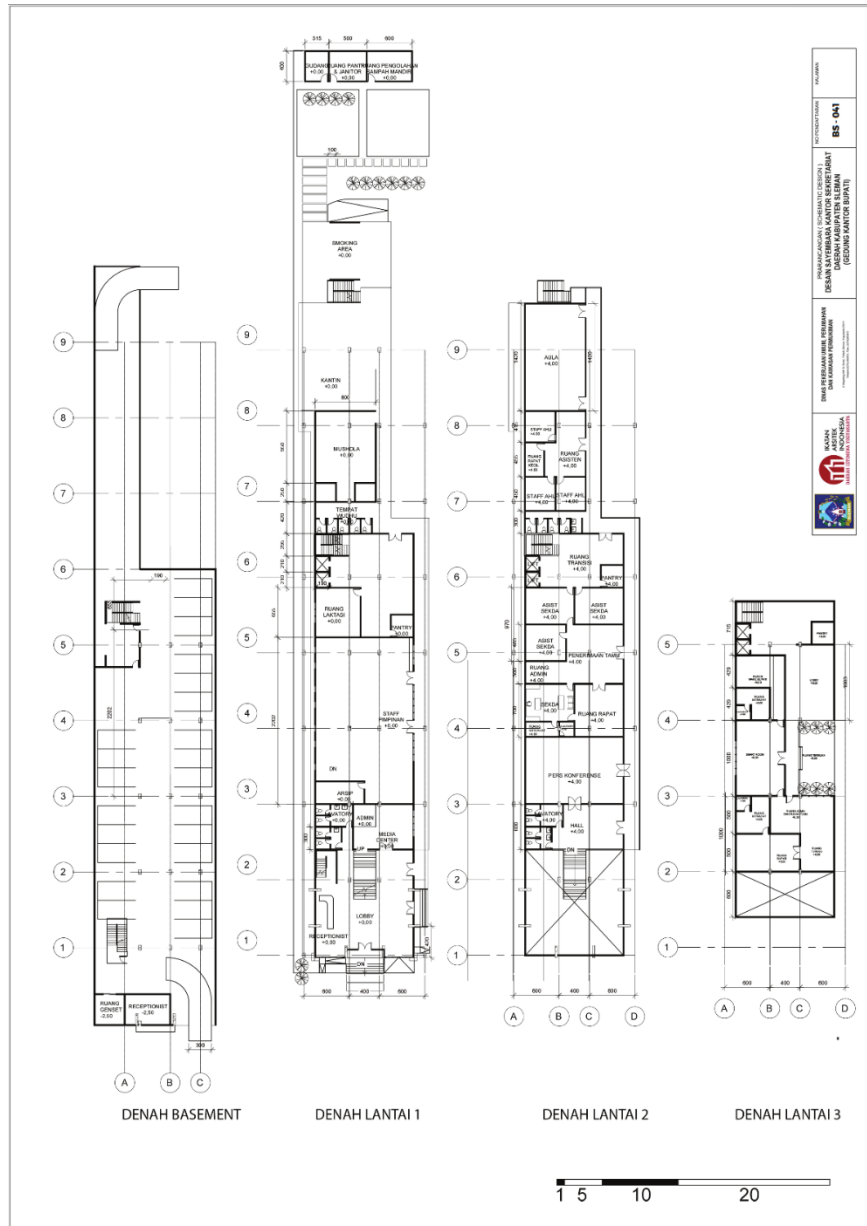
1. Konsep tata hijau
 - a. Konsep pengembangan kawasan pemerintahan Kabupaten Sleman adalah menekankan pada kawasan yang berbasis pada konsep “park” yaitu kawasan yang yang dikembangkan dengan menggunakan vegetasi tegak secara menyeluruh. Pohon merupakan bagian penting dalam memproduksi O₂ dan menghisap CO₂. Konsep “Park” di dalam kawasan pemerintahan akan memberikan dampak, antara lain : menurunnya suhu udara akibat masuknya udara di bawah pohon. Hal ini akan berpengaruh terhadap suhu di dalam ruang. Konsep “*park*” di dalam kawasan berfungsi juga sebagai filter terhadap polutan, debu dan kotoran, sehingga mampu meningkatkan kualitas udara. Konsep “park” di dalam kawasan berfungsi untuk mengurangi kebisingan yang ditimbulkan oleh gangguan suara.
 - b. Pada kawasan tersebut ditanam pohon yang mampu mencapai umur pohon hingga ratusan tahun. Dengan adanya pohon yang mempunyai umur ratusan tahun, maka pohon tersebut dapat menjadi representasi dari sejarah kawasan pemerintahan Kabupaten Sleman.
 - c. Jenis vegetasi yang dipilih adalah pohon yang mempunyai umur panjang, tidak mudah patah, mempunyai ketinggian hingga puluhan meter dan menghasilkan O₂ yang tinggi, misal : pohon trembesi, pohon asem, dan sebagainya.
 - d. Untuk meningkatkan daya serap tanah dari air hujan, maka diperlukan lubang biopori di lahan terbuka seperti parkir, taman/alun-alun dan sebagainya.
2. Konsep pemanfaatan lingkungan
 - a. Pemanfaatan air hujan yang ditampung di ground reservoir pada dasarnya adalah mengembangkan *zero waste* yaitu upaya yang dilakukan agar air hujan tidak terbuang ke drainase perkotaan, melainkan di daur ulang untuk pemeliharaan taman dan sebagainya. Air hujan didapat melalui sistem penampungan air hujan yang jatuh di atap. Dengan

sistem jaringan tersebut, hujan yang berada di atas atap dapat ditampung di *ground reservoir*.

- b. Pengelolaan limbah sampah khususnya sampah organik untuk dikembangkan menjadi pupuk kompos sebagai upaya untuk menyuburkan tanah serta upaya sampah tidak dibuang ke lain tempat.
- c. Koridor, lobi dan ruang yang hanya digunakan temporal diharapkan tidak menggunakan *Air Conditioner*, melainkan sistem penghawaan buatan yang menggunakan kipas angin untuk membuang udara dari dalam ke luar.

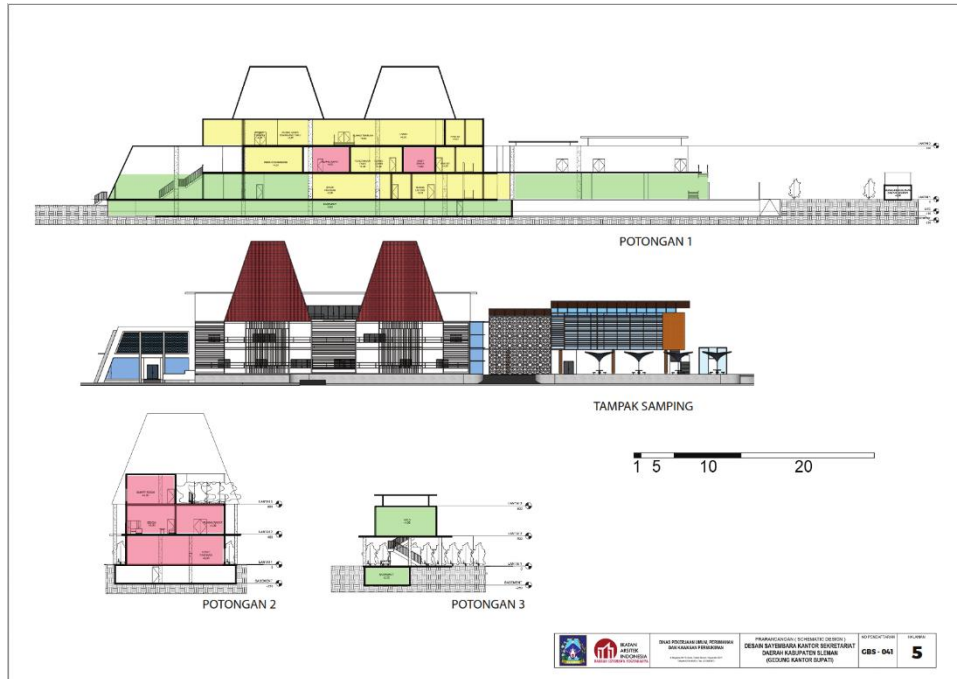
BAB VI HASIL RANCANGAN

6.1 Denah

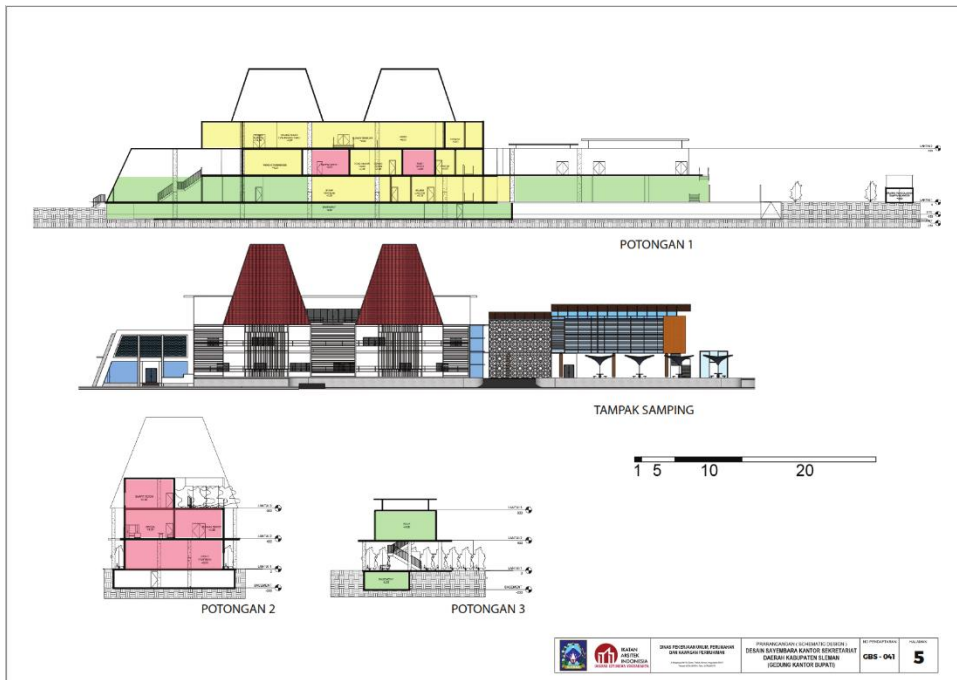


Gambar VI.1 Denah
Sumber: hasil pengembangan, 2020

6.2 Tampak dan Potongan



Gambar VI.2 Tampak dan Potongan 1
Sumber: hasil pengembangan, 2020



Gambar VI.3 Gambar Tampak dan Potongan 2
Sumber: hasil pengembangan,, 2020

6.3 Perspektif



Gambar VI.4 Perspektif
Sumber: hasil pengembangan, 2020

BAB VII KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah:

1. Konsep pelayanan yang bersifat transparansi diperlihatkan pada penggunaan kaca blok yang memperlihatkan kegiatan di dalam ruang.
2. Konsep pelayanan yang bersifat kecepatan berpengaruh terhadap tata ruang yang lebih mengedepankan aspek pelayanan terhadap publik dengan menempatkan ruang yang berhubungan dengan pelayanan diletakkan di bagian lantai dasar bagian depan.
3. Konsep pelayanan yang bersifat kecepatan diperlihatkan pada kemudahan sistem sirkulasi yang lugas dan langsung pada kegiatan yang dimaksud serta kemudahan pencapaian dari parkir hingga pintu masuk yang dapat diakses dari jalan dan ruang parkir.
4. Penempatan tangga untuk ke lantai atas diperlihatkan secara terbuka dan mudah diakses.
5. Konsep pelayanan yang egaliter diperlihatkan pada zonasi ruang yang bersifat fungsional dengan menekankan fungsi publik.

7.2 Saran

1. Perlunya penelitian yang mendalam terhadap aspek lokal yang dapat dikembangkan dalam bentuk bangunan sebagai perwujudan arsitektur lokal yang menjadi ikon saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, A. (1994). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ching, F. (1979). *Architecture : Form, Space and Order*,: . Jakarta: Penerbit PT Erlangga.
- Mulyono, Edi. dkk, E. (2012). *Belajar Hermeneutika*. -: -.
- Nöth, W. (1990). *Handbook Of Semiotics*. Blommington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Piliang, A. (2006). *Transpolitika: dinamika politik di dalam era virtualitas*. . Yogyakarta: Jalasutra.
- Salura, P. (2015). *Sebuah Kritik : Arsitektur yang Membodohkan*. Jakarta: Gakushudo.
- Thiis-Evensen, T. (1987). *Archetypes in Architecture*. Oslo: Norwegian University Press.
- Ven, C. (1991). *Ruang dalam Arsitektur (terjemahan)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.